

3389

Muz

P

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2192/KI/FAH

Tgl. : 26-6-1997

P E R B E R D A Y A A N U M A T

MENYONGSONG ABAD XXI

Disampaikan Oleh :

M. Mawardi Muzamil, SH, CN, MM

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

DIAN NUSWANTORO

SEMARANG

1996

PERBERDAYAAN UMAT

MENYONGSONG ABAD XXI *

Oleh : M.Mawardi Muzamil,SH,CN,MM **

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Menurut laporan Pacific Economic Cooperation Council (lembaga dibawah Asia Foundation - San Francisco) menyebutkan bahwa Indonesia kini tergolong Negara Industri Baru (Newly Industrialized Countries) . Penggolongan tersebut antara lain karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi selama 25 tahun dimana dalam periode 1965 - 1980 rata pertumbuhannya mencapai 7,9 %, sementara periode 1980 - 1985 sebagai akibat memburuknya harga minyak maka laju pertumbuhannya menurun hingga rata-rata 3,5 %, dan baru kemudian dalam periode 1985 - 1990 pertumbuhan ekonominya kembali mencapai rata 5,98 % setelah semakin berperannya komoditi non migas dalam struktur ekspor Indonesia, pada kurun waktu tiga tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7 % setahun dan banyak kalangan yang optimis bahwa dimasa yang akan datang diperkirakan tetap 7 , 2 %

* Malakah disampaikan dalam Panel Diskusi : Pemberdayaan SDM Menyongsong ABAD KE XXI yang diselenggarakan Oleh STMIK DIAN NUSWANTORO tanggal 25 Oktober 1996

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

per kapita, Indonesia telah berhasil mengentaskan diri dari posisi negara miskin dengan pendapatan perkapita sebesar US\$ 205 pada tahun 1965 menjadi negara dengan pendapatan perkapita US\$ 570 atau senilai Rp 3650 perhari pada tahun 1992. dan tahun 1996 diperkirakan US\$ 950 atau senilai Rp 6082. dan diharapkan dalam penghujung Milenium ke 3 ini menjadi US\$ 1280 atau senilai Rp 8.195,50.

Demikian juga dengan keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan yang mencapai 70 juta pada tahun 1965 kemudian menjadi 27 juta pada tahun 1990.

Untuk mewujudkan harapan pertumbuhan ekonomi ditahun mendatang 7,2 % tersebut maka diperlukan tambahan investasi baik dari pasar modal yang akan membantu sektor swasta dan investasi akan mendorong pertumbuhan dari sektor-sektor industri manufaktur, utilitas dan sektor properti di samping peranan sektor non migas.

Upaya-upaya Pemerintah untuk meningkatkan pemerataan diantara masyarakat sudah banyak dilakukan pemerintah melalui Proyek Inpres, KUD, Bangdes, pengalihan 25 % saham konglomerat untuk koperasi, dan kebijaksanaan lainnya. Reformulasi usaha-usaha pembangunan untuk memperhitungkan alternatif insentif sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah memang memerlukan perjalanan waktu yang cukup lama, dengan metode dan teknik yang kompleks.

Dari berbagai penelitian ekonomi menggambarkan bahwa timbul ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan serta ketimpangan dalam mengakses sumber daya lain lebih banyak dipengaruhi oleh kurangnya modal (dana) untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa tingkat perputaran dana di masyarakat pedesaan sangat kurang padahal 80 % rakyat Indonesia hidup di pedesaan, maka dari

itu diperlukan adanya lembaga keuangan yang mampu mensuplai dana bagi aktivitas ekonomi pedesaan.

Disamping itu bila dilihat dari pelaku perekonomian Indonesia, 97 % diantaranya adalah sektor ekonomi rakyat, namun kenyataannya kelompok ini ternyata hanya memiliki volume usaha kurang dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saja pertahun. ini menunjukkan masih termarginalisasi umat dalam struktur perekonomian. Untuk itulah upaya pengembangan kemampuan ekonomi umat sangat penting. Hal ini bisa ditempuh dengan menguatkan lembaga pemberi bantuan modal dan manajemen usaha serta terus ditumbuh kembangkan semangat kebersamaan dan kewirausahaan.

Demikian juga penduduk yang 80 % mayoritas umat Islam tersebut ternyata hanya menguasai 20 % saja dari kekayaan nasional. sementara penduduk yang 20 % justru menguasai 70 % kekayaan nasional dan sebanyak 35 % GDP Nasional dihasilkan hanya oleh 10 konglomerat. Ketimpangan tersebut haruslah segera diselesaikan dengan pemberdayaan Umat. Sistem produksi dari berbagai sektor segera dikaji agar dapat ditemukan formulasi yang memungkinkan mayoritas penduduk dapat memberikan kontribusi lebih proporsional bagi pendapatan nasional. Demikian juga harus dilakukan upaya untuk mendorong tumbuhnya pengusaha kelas menengah dan besar dari kelompok mayoritas umat Islam dengan cara menelusuri dan membentuk model pengembangan

Lembaga Alternatif Keuangan Umat

Penyediaan lembaga yang mampu menjangkau pedesaan ternyata belum menjadi alternatif bagi perbaikan ekonomi mereka. Hal ini berkaitan dengan ideologi mendasar yang dianut oleh sebagian besar masyarakat muslim bahwa transaksi pinjaman dengan bank umumnya merupakan transaksi yang ditentang oleh agama karena

pada prakteknya menggunakan sistem bunga sebagai ukuran harga atas uang. Sistem demikian merupakan riba yang sangat ditentang oleh agama Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an.

Bank Perkreditan Rakyat maupun Baitul Maal wa Tanwil (BMT) berdasarkan Syari'ah merupakan alternatif terbaik bagi salah satu penyelesaian problematika ekonomi masyarakat muslim Indonesia khususnya Jawa Tengah . Sebagaimana diketahui BPR Syari'ah ini merupakan bank perkreditan yang beroperasi seperti halnya BMI yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Jika bank ini bisa beroperasi secara lancar, maka sangat mungkin kreditnya dapat terjangkau oleh segenap masyarakat pedesaan.

Dana yang disalurkan melalui BPR Syari'ah akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) meningkatkan pemerataan kemampuan mengakses sumber dana bagi masyarakat pedesaan,
- 2) dimungkinkan adanya kredit dengan bagi hasil,
- 3) dimungkinkan adanya kredit tanpa bunga dan sebagai imbalan balas jasa adalah pengganti biaya administrasi,
- 4) memungkinkan adanya mobilisasi tabungan masyarakat muslim di pedesaan, sehingga dana yang tersimpan di tengah tengah masyarakat dapat diefektifkan untuk membantu pihak lain yang membutuhkan.

Baituttamwil?

Meski sudah ada Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pembentukannya diprakarsai ICMI dan MUI, beberapa pejabat termasuk Presiden Soeharto, serta para dermawan muslim, namun karena peraturan pelaksanaan UU Perbankan maka BMI baru boleh membuka cabang sesudah dua tahun. Belum lagi soal keterbatasan sumberdaya manusia, dan lainnya kemampuan BMI menjadi sangat

terbatas untuk memperbanyak cabang-cabangnya dalam waktu singkat. Hingga saat ini cabang BMI baru berada di Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Sementara pendirian dan pengembangan BPR/S yang modal setornya Rp 50 juta juga lamban sekali kini baru sekitar 70 BPR/S, antara lain karena kendala perizinan maupun permodalan serta pelatihan dan prasarana yang kurang memadai.

Barangkali karena alasan itu pula maka Presiden Soeharto dalam pembukaan Muktamar ke II ICMI awal Desember 1995 yang lalu sekaligus mencanangkan berdirinya 1000 Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) atau Balai usaha Mandiri Terpadu seluruh Indonesia, termasuk 53 BMT di Jawa Tengah yang peresmiannya dilakukan oleh B.J Habibie saat pelantikan Pengurus ICMI Orwil Jawa Tengah di Semarang. Kemudian BMT tersebut cepat berkembang di Jawa Tengah dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan telah menjadi 152 dan bersama sama dioperasikan oleh H Harmoko 6 Juni 1996 beberapa waktu lalu.

Bagi Hasil berdasar Syariah

Sama halnya dengan BPR-S, maka BMT juga dioperasikan berdasarkan syariah. Yakni menggunakan berbagai produk bisnis/perniagaan berlandaskan bagi hasil dan jual beli yakni pembiayaan mudharabah: bagi hasil, musyarakah : bagi hasil bersyarikah, murabahah : pemilikan barang jatuh tempo, bai'u bithaman ajil : pemilikan barang cicilan dan beberapa produk lain.

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Sedang prinsip jual beli dapat dilakukan dengan membayar tangguh yaitu pada saat benda yang diperjual belikan itu telah

di manfaatakan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai jadwal atas kesepakatan dan atas analisa usaha yang dilakukan.

Lokomotif ekonomi masyarakat kelas bawah ?

Dengan asumsi bahwa sistem BMT ini dapat diterima dan telah menyebar di berbagai pelosok tanah air, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, mampukah BMT menjadi lokomotif penarik tumbuhnya ekonomi masyarakat kelas bawah?

Karena itu, maka yang perlu dilihat adalah penggunaan kredit. Pembiayaan (kredit) dalam hal ini yang disalurkan BMT, baru akan bermakna bila pasar berlangsung secara dinamis. Tetapi kalau sampai kredit yang disalurkan untuk mendukung produk tanpa melihat daya dukung pasar, maka biasanya yang terjadi adalah melimpahnya barang di pasar (over supply). Bila hal ini terjadi, maka mitra usaha BMT akan kesulitan menjual barangnya di pasar. Disusul dengan macetnya kredit yang dipinjamkan BMT.

Karena itu sistem bagi hasil dan jual beli yang diisyaratkan dalam BMT harus benar-benar dapat digunakan sebagai media untuk memperbaiki kualitas dan skala ekonomi usaha kecil. Bagi BMT sejak dini perlu memperkuat kelembagaannya dengan sejumlah perangkat (instrumen) yang dapat memperkecil kerugian di pihak pengusaha, sekaligus meningkatkan produktivitas BMT.

Kredit macet selain akan memperburuk likuiditas BMT juga berakibat rendahnya bagi hasil yang diberikan kepada penyimpan. Dengan demikian baik tidaknya sebuah BMT harus diukur dari sejauh mana ia dapat meningkatkan kemampuan pengusaha kecil, baik segi kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini BMT tidak boleh menyamakan perannya dengan lembaga kredit yang lain, yang mengendalikan pada pembiayaan dan kelayakan kredit semata.

BMT tentu saja tidak boleh hanya berhenti pada sektor keuangan saja. Untuk itu BMT perlu lebih berorientasi keluar, dan bertindak aktif memperbaiki kualitas usaha mitranya. Sementara untuk memperkecil risiko kegagalan, diperlukan kerjasama antar-BMT. Juga memperbesar kemampuan BMT dan meretas jalan bagi terbentuknya akses informasi pasar, baik pasar hasil maupun bahan baku yang selama ini sulit ditembus.

Dalam kaitan ini, maka perbaikan manajemen, mutu produksi, aplikasi teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia, dan mencari pasar seluas-luasnya perlu diperhatikan sejak dini. Untuk itulah mahasiswa / alumni Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer khususnya Dian Nuswantoro di tuntut untuk ikut berpartisipasi untuk lebih memberdayakan Umat tersebut.

Semarang 25 Oktober 1996

M. Mawardi Muzamil, SH, CN, MM

KEPUSTAKAAN

- Azis, Amin, H.M, *Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Muamalat*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1992.
- Chalid Hasibuan, *Bank Syari'ah Islam Di Indonesia*, Jakarta, 1991,
- Danusaputro, dkk, *Monetasi Pedesaan*, Jakarta , 1991
- Ibrahim Hosen, *Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*, ICMI, Jakarta, 1991
- ICMI, *Hasil Muktamar II Ikatan Cendekiawan Muslim Se Indonesia (ICMI)*, ICMI, Jakarta, 1995
- Imhar Burhanudin, *Struktur Organisasi BPR Syariah*, ICMI, Jakarta, 1991
- Indonesia, *Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan* Sinar Grafika, Jakarta, 1992).
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Hukum Ekonomi Islam : Analisa Tentang Bank Syari'ah dan Asuransi Takaful*, FH-UI, Depok,
- Keegen Warrren, *Global Marketing*, Alex Medya Komputindo, Jakarta, 1992.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Pustaka, Bandung, 1984.
- Muganegara, Rizal, *Profil Baitul Maal Wa Tanwil*, Departemen Agama, Pokjapus Dakwah Pembangunan, 1993
- PINBUK, *Baituttanwil* , Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Jakarta.
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT, Balai Usaha Mandiri Terpadu, Baitul Mal Wat Tanwil*, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Jakarta.
- Sitomorang, Johny, *Peta Ekonomi Kawasan Asia Pasifik Dan Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dalam Memasuki Abad ke 21* , IPWI, Jakarta , 1996
- Whitehead, *Bagaimana Memajukan Perusahaan Kecil*, Mu-tiara, Jakarta, 1978.